



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2025**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH**

Jl. Hasyim Banta Muda No.1 Gp. Mulia
Banda Aceh

BANDA ACEH 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunianya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2025. Sebagai pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2025 dengan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara khususnya diwilayah Kota Banda Aceh dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat NKRI dan meningkatkan kehidupan demokrasi di daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2025.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888

Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolbna@ymail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 800.05/

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH

- Menimbang** :
- Bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan;
 - Bahwa dengan adanya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
 - Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Bahwa berdasarkan Surat Inspektorat Kota Banda Aceh dengan Nomor 710/133/BA-LHE/2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2024, dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) harus disusun secara semesteran atau triwulan;
 - Bahwa sehubungan dengan huruf a,b,c dan d maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banda Aceh.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2025-2045;
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Tujuan Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah untuk memperoleh informasi pencapaian kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 11 April 2025 M

12 Syawal 1446 H

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Banda Aceh



HERU TRIWIJANARKO, S.STP.M.SI

Pembina Utama Muda
NIP.19800104 199810 1 001

IKTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan untuk mencapai visi, misi yang di jabarkan melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan instrument pertanggung jawaban dalam pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh selama menjalankan tugasnya sebagai perangkat daerah, yang diserahkan wewenang tugas dan tanggung jawab yang menunjang penyelenggaraan urusan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kesatuan bangsa, dan politik.

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan Bangsa dan Negara khususnya di wilayah Kota Banda Aceh dalam upaya mempertahankan Kesatuan dan Persatuan Bangsa dalam rangka memperkuat **NKRI** dan meningkatkan kehidupan demokrasi di daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Banda Aceh, 14 Januari 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Banda Aceh



RIZAL ABDILLAH, S.SoS, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731218 199303 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKTISAR EKSEKUTIF	5
DAFTAR ISI.....	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Aspek Strategis Organisasi	8
1.2. ISU - ISU STRATEGIS	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023-2026.....	12
2.2. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025	16
2.3. PERJANJIAN KINERJA	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. CAPAIAN KINERJA	24
3.2. ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN DAN PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DIRENCANAKAN	36
3.3. REALISASI ANGGARAN	37
TABEL KEGIATAN PROGRAM YANG MENGALAMI PERUBAHAN ANGGARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2025	37
TABEL REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2025.....	41
BAB IV PENUTUP	45

BAB I PENDAHULUAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai salah satu SKPK Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik secara eksplisit tercantum dalam RPJP Kota Banda Aceh 2007-2027 dan secara implisit kedudukan Badan Kesbangpol untuk penyelenggaraan program Kesatuan Bangsa dan Politik dinyatakan dalam RPJMD.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat mutlak bagi setiap Instansi pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Semangat Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintahan, telah menumbuhkan kembangkan perubahan etos kerja yang lebih dinamis dan strategis menuju kearah yang lebih baik. Semangat reformasi birokrasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan memperhatikan tujuan terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan optimalisasi pelayanan publik.

Dalam era desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut lebih responsif melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah. Oleh Karena itu pengembangan dan penetapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sangat diperlukan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, diperlukan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap tingkatan instansi pemerintahan.

Sebagai sebuah organisasi, instansi pemerintah dituntut untuk menyampaikan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya yang telah dilaksanakan selama satu tahun berjalan. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/komunikasi terhadap capaian kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan dan harus dapat dipertanggungjawabkan sekaligus menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sebagai media pelaporan kinerja tahunan pemerintah daerah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)) sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, LKJIP dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh menyusun LKJIP Tahun 2025. LKJIP Tahun 2025 bagi Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, merupakan LKJIP tahun ke empat dari Renstra tahun 2023-2026, dan sekaligus menjadi penilaian atas capaian kinerja selama 1 (satu) tahun.

Uraian KJIP ini terdiri dari penetapan indikator kinerja sasaran Renstra Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh periode 2023-2026 yang telah mendapat dukungan pembiayaan dari APBD pada Tahun 2025 serta menganalisa capaian kinerja pada Tahun 2025 pada tingkat sasaran yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen Renstra Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh periode 2023-2026.

1.1. Aspek Strategis Organisasi

Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, merupakan satuan kerja perangkat kota yang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, serta Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

1.1.1. Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat
 - c. Kasubag Umum Kepegawaian Dan Aset
 - d. Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah;
 - e. Perencana Ahli Muda
- (2) Kabid Bina Idiologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa, terdiri dari:
 - a. Analisis Kebijakan Ahli Muda Bina Idiologi Dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Analisis Kebijakan Ahli Muda Pembinaan Karakter Bangsa
- (3) Kabid Politik Dalam Negeri, terdiri dari:
 - a. Analisis Kebijakan Ahli Muda Pengembangan Budaya Dan Etika Politik;
 - b. Analisis Kebijakan Ahli Muda Fasilitas Partai Politik Dan Pemilu.
- (4) Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Ormas, terdiri dari:
 - a. Analisis Kebijakan Ahli Muda Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya; dan
 - b. Analisis Kebijakan Ahli Muda organisasi Kemasyarakatan.
- (5) Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari:
 - a. Analisis Ahli Muda Penanganan Konflik; dan
 - b. Analisis Kebijakan Ahli Muda Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi, Informasi

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

1.1.2.1 Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dibentuk Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas Membantu Walikota Dalam Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

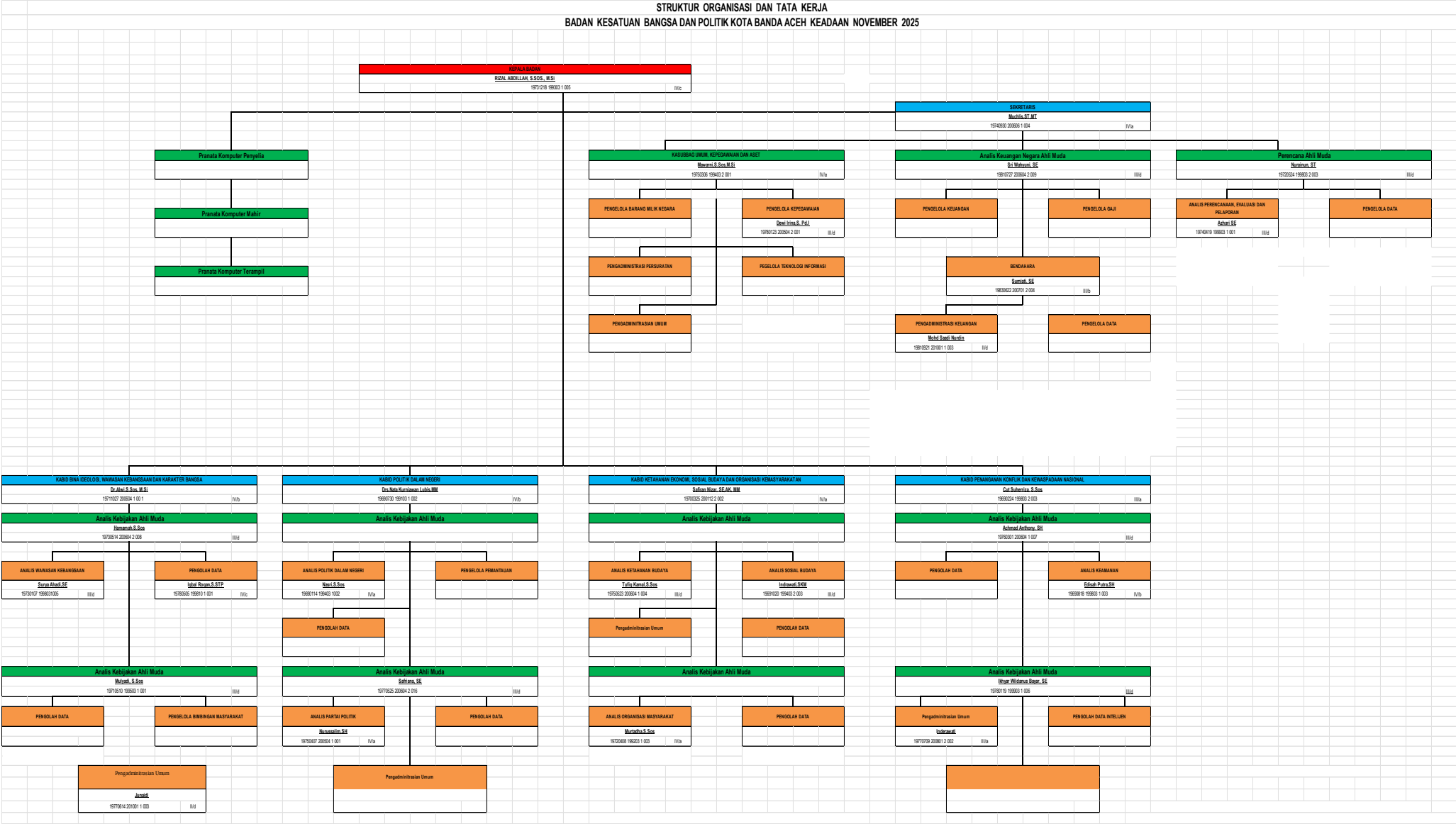
1.1.2.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Badan Kesbangpol mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program Badan.
- b. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Urusan Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Politik dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, agama, Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik, dan Kewaspadaan Nasional;

- c. Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter bangsa, Politik dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Politik dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik, dan Kewaspadaan Nasional;
- e. Penyelenggaraan Kegiatan Kesekretariatan;
- f. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Badan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan

Tabel 1.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Bulan Juni 2025



1.1.3. Sumber Daya

Pada akhir Tahun 2025 jumlah pegawai Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh sebanyak 35 orang. Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia, jumlah pegawai Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH		JUMLAH (ORANG)	KET
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
	PNS				
1	IV/c	2	-	1	
2	IV/b	3	-	3	
3	IV/a	5	2	7	
4	III/d	6	6	12	
5	III/c	-	-	0	
6	III/b	-	1	1	
7	III/a	-	-	0	
8	II/d	-	2	2	
	Jumlah PNS	16	11	26	
	Non PNS				
1	Tenaga Non PNS	3	2	5	
	Tenaga Non PNS	3	2	5	
	JML PNS + NON PNS	19	13	31	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Jumlah pegawai Badan Kesbangpol berdasarkan golongan terbesar pada golongan III/d sebanyak 12 orang dari 26 orang Pegawai dan jumlah tenaga kontrak sebanyak 5 orang. .

Tabel 1.3
JUMLAH PEGAWAI BADAN KESBANGPOL BERDASARKAN JABATAN/ESELONERING

No.	Jabatan	Jumlah orang
1	Kepala	1
2	Sekretaris	1
3	Kabid	4
4	Kasubbag	1
5	Jabfung Perencana Ahli Muda	1
6	Jabfung Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	1
7	Jabfung Analis Kebijakan Ahli Muda	5
8	Analis Keamanan	1
9	Analis Ketahanan Budaya	1
10	Analis Sosial Budaya	1
11	Analis Perencana, Evaluasi Dan Pelaporan	1
12	Analis partai Politik	1
13	Pengelola pemantau	1
14	Pengelola Kepegawaian	1
15	Pengolah Data	1
16	Pengelola Barang Milik Negara	1
17	Bendahara	1
18	Pengadmistrasian Persuratan	1
19	Pengadmistrasian Umum	0
20	Pengadmistrasian Keuangan	1
21	Pengadministrasian Sarana Dan Prasarana	1
	Jumlah	27

Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa masih ada 3 (tiga) orang pada jabatan fungsional Kebijakan Ahli Muda yang masih kosong. Adapun jabatan fungsional yang kosong Adalah Analis Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebanyak 2 (dua) orang dan Analis Kebijakan Ahli Muda pada bidang politik dalam Negeri sebanyak 1 (satu) orang.

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S3	1
2	S 2	3
3	S 1	19
4	D III	-
5	SLTA	3
6	SLTP	-
	Jumlah	26

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawainya, sudah menunjang kinerja Badan Kesbangpol;

Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja SKPD adalah ketersediaan barang inventaris dalam menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh. Pengadaan barang-barang inventaris tersebut berasal dari dana APBK Banda Aceh dan juga atas bantuan dari pihak lain. Rincian tersebut dapat dilihat pada daftar Tabel berikut:

TABEL 1.5
REKAPITULASI PERLENGKAPAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH

No	Uraian	Unit
1.	Tanah	1 parsial
2.	Gedung dan Bangunan	2 unit
3.	Peralatan dan Mesin	108 unit
4.	Jaringan	- unit
5.	Aset tetap lainnya	- unit

1.2. ISU - ISU STRATEGIS

1.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh sebagai pelaksana tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung pelaksanaan tugas
3. Belum akuratnya kualitas analisa data dan informasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai masukan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut;

Penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas.
2. Masih Kurangnya pemahaman Aparatur tentang TUPOKSI dalam pelaksanaan tugas
3. Belum optimalnya pola koordinasi antar SKPD, Instansi dan Lembaga terkait.
4. Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

1.2.3. Telaahan Renstra SKPD dan Renstra Kota Banda Aceh.

Dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesbangpol dan Renstra Kota Banda Aceh terdapat beberapa faktor penghambatan dan faktor pendorong

Adapun hambatan umum yang dijumpai baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan yang mempengaruhi kinerja pengelolaan, pendanaan dan pelayanan SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahap koordinasi, hambatan yang sering muncul adalah adanya hal-hal baru yang muncul bersamaan dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi. Untuk mengatasinya dilakukan prosedur standar yaitu melalui evaluasi dan penilaian sampai dengan ditemukannya prioritas dalam mengatasinya beserta jadwal waktu dalam menanganinya.
- b. Pada sebuah sistem kerja secara utuh maka faktor SDM sangat menentukan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Belum berkembangnya SDM dalam sebuah tim kerja akan berpengaruh terhadap efektifitas dan kualitas pekerjaan. Dari sisi ini, upaya dalam menangani hambatan yang muncul adalah dengan mengintensifkan koordinasi, mengefektifkan materi/bahan koordinasi, dan mengupayakan ketepatan waktu pekerjaan serta mengeksplorasi cara-cara baru yang lebih efektif/efisien.
- c. Pada sisi program dan kegiatan masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan pada setiap program atau kegiatan.

Sedangkan peluang yang menunjang program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh antara lain;

- 1) Adanya dukungan dari Pimpinan dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Adanya partisipasi Masyarakat dalam menjaga kantrantibmas .
- 3) Meningkatnya teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi baik dari pusat maupun daerah.
- 4) Meningkatnya dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah.
- 5) Tersedianya aparatur memadai.

1.2.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam mewujudkan Kantrantibmas yang berwawasan kebangsaan dan kerukunan beragama ditengah-tengah masyarakat, Badan Kesbangpol dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut:

- a) Tergerusnya Toleransi Pada Pemilu 2025
- b) Perlunya Optimalisasi Wawasan Kebangsaan
- c) Perlunya Optimalisasi Pendidikan Politik
- d) Pemahaman Demokrasi Yang Berlebihan
- e) Penataan Dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

1.2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

1.2.5.1. Peluang

- 1) Adanya dukungan dari Pimpinan dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Adanya partisipasi Masyarakat dalam menjaga kantrantibmas.
- 3) Meningkatnya teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi baik dari pusat maupun daerah.
- 4) Meningkatnya dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah.
- 5) Tersedianya aparatur memadai.
- 6) Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung

1.2.5.2. Tantangan

- 1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia.
- 2) Lemahnya basis data menyebabkan validitas data belum optimal.
- 3) Masih belum optimalnya pemahaman masing-masing bidang dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat.

- 4) Kemajuan teknologi informasi dan tingginya tingkat partisipasi publik tidak diimbangi dengan penataan kelembagaan daerah yang lebih proporsional dan responsif sesuai dengan visi dan misi yang diemban.
- 5) Rendahnya dukungan keuangan daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sehingga belum dapat berjalan secara optimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pasal 6 ayat 2 disebutkan SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 4 (Empat) Tahun.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dikembangkan bagi penyelenggaraan manajemen kinerja yakni merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan dalam kerangka pemenuhan visi misi organisasi. Substansi perencanaan strategis adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada.

Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan.

Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis disegala arah dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perencanaan Strategis memuat sejumlah fakta, persoalan dan argumentasi mendasar pemilihan satu program dan kesiapan serta bagaimana melaksanakannya, untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan hasil secara terukur.

2.1. RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023-2026

Langkah penting dalam proses perencanaan strategis adalah mengembangkan rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan yang lebih baik, serta menyatakan hasil-hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diimplementasikan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka **Visi** Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2003-2026 adalah;

“TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA YANG KONDUSIF, DEMOKRATIS, TENTRAM DAN DAMAI DALAM BINGKAI SYARIAT ISLAM.

Yaitu menjadikan Kota Banda Aceh yang termasyur dan terpandang dalam 3 pilar utama yaitu agama, ekonomi dan pendidikan, menuju kejayaan dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan serta keadilan gender. Sedangkan Bingkai Syariah adalah Mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan sesuai Syariat Islam.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka dilaksanakan misi. Misi merupakan identifikasi tujuan, sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatan ikon disaat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun Misi Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemahaman terhadap ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, rasa kesadaran bela Negara dan cinta tanah air untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan dukungan stabilitas ketahanan ekonomi, seni, budaya, beragama dan organisasi kemasyarakatan yang sejahtera dengan menjunjung nilai-nilai kebhinekaan, toleransi dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Meningkatkan Pemahaman budaya politik yang demokratis dan membangun kemitraan kelembagaan politik yang harmonis.
4. Meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan serta penanganan konflik yang memberikan dampak terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Memelihara sinergitas dan harmonisasi koordinasi dibidang intelijen daerah terhadap kerawanan social serta perlintasan dan pergerakan orang asing, tenaga kerja asing dan ormas asing.
6. Mewujudkan peran lembaga penggerak keagamaan dan lembaga penggerak kemasyarakatan lainnya dibidang kesatuan bangsa dan politik.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

2.1.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada

jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 berdasarkan rumusan Misi dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Meningkatkan efektifitas dan profesionalisme kerja
2. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dengan semua instansi dan lembaga lain dalam rangka memantapkan dan memelihara keamanan dan kenyamanan
3. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam Berwawasan Kebangsaan
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembinaan dibidang Politik dan organisasi kemasyarakatan

2.1.1.2. Sasaran

1. Terlaksananya kegiatan kantor dengan efektif dan professional
2. Peningkatan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat
3. Peningkatan pemahaman masyarakat akan bahaya Minuman keras dan narkoba
4. Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam membina kerukunan beragama
5. Peningkatan Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya wawasan kebangsaan
6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan partai politik
7. Pelaksanaan pemilu/pilkada damai

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Target Renstra			
		2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
1	Indek Ketentraman Umum	74.61	74.63	74.64	75.09
2	Capain Tingkat Penangan Konflik Sosial	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Tingkat Paritisipasi Pemilih Dalam Pemilu Dan Pilkada	0	0	73.79	0
4	Persentase Ormas, OKP, Dan LSM Yang Aktif	49.25%	50.13	50.15%	50.17%

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

Tujuan 1. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan, wawasan kebangsaan, sosial budaya serta stabilitas politik di Kota Banda Aceh

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			KONDISI AKHIR (2026)
				2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan keamanan dan kenyamanan, wawasan kebangsaan, sosial, budaya dan stabilitas politik	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan, wawasan kebangsaan, sosial, budaya serta stabilitas politik di Kota Banda Aceh	Indeks Ketentraman Umum	74.61	74.63	74.64	75.08	75.09
		Capaian Tingkat Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	-	-	73.79%	-	-
		Persentase Ormas, OKP dan LSM yang Aktif	49.21%	49.25%	50.13%	50.15%	50.17%

NO	SASARAN	PROGRAM	
1	2	3	
1	Capaian Tingkat Penanganan Konflik Sosial	1.1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa
		1.2.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
		1.3.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
2	Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Dan Pilkada		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3	Persentase Ormas, OKP, Dan LSM Yang Aktif		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

2.1.2. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Adapun strategi yang ditempuh yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui keikutsertaan dalam diklat teknis, diklat kepemimpinan, dan diklat fungsional.
2. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas SKPD, lintas Pemerintahan dan lintas stakeholders lainnya.
3. Membangun kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat.
4. Melaksanakan pembinaan masyarakat yang berwawasan kebangsaan, kesadaran berpolitik, ketertiban dan keamanan lingkungan menuju Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan.

2.1.3. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi SKPD. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan.

Arah kebijakan Badan Kesbangpol Tahun 2025-2026

1. Mengikutsertakan aparatur pada kegiatan bimtek dan diklat-diklat
2. Melaksanakan Pembinaan Ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan.
3. Melaksanakan pembinaan Politik dan organisasi kemasyarakatan
4. Melaksanakan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan umat beragama.
5. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama dengan instansi terkait.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap semua pelaksanaan kegiatan

2.2. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2025

ditetapkan pada awal Tahun 2025, yang memuat target kinerja atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan 2025 Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh sebagai berikut:

TABEL 2.2
PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah
<i>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi OPD yang Tersusun</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Administrasi Umum</i>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Dilaksanakan
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
<i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>
Pelaksanaan Kebijakan DI Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Koordinasi DI Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
<i>Perumusan Kebijakan Dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	<i>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilolihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilolihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>Persentase Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang Yang mengikuti Kegiatan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik</i>	<i>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan.
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pasal 9 disebutkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang akan dikelolanya. Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan reward and punishment.

Penyusunan perjanjian kinerja Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbang Pol Kota Banda Aceh periode 2023-2026 dan memperhatikan program, kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun 2025 sebesar Rp.11.172.887.727,- setelah terjadi Perubahan anggaran Pertama menjadi Rp.8.731.354.627,- selanjutnya terjadi Perubahan Anggaran ke 2 maka Anggaran untuk badan Kesbangpol menjadi sebesar Rp.12.134.533.109,-

Target Indikator Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasarannya.

Sasaran strategis dan target indikator kinerja Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2025 ditetapkan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh pada Januari 2025, sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESBANGPOL KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Sasaran Strategis:

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Meningkatnya Tata Kelola Adminitrasi Perencanaan Keuangan, Kepegawaian, Pelaporan dan Penatausahaan Aset	1	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran Badan Kesbangpol yang dilaporkan tepat waktu	100%
	2	Pesertase Laporan Keuangan yang dilaporkan tepat waktu	100%
	3	Persentase tingkat kedisiplinan pegawai pada Badan Kesbangpol	98%
	4	Predikat hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	B
	5	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	75%

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis, diarahkan melalui pelaksanaan 1 program, 5 kegiatan dan 11 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut;

Sasaran Strategis 1:

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Capaian Tingkat Penanganan Konflik	1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang
	2	Jumlah Paskibraka	8 Orang
	3	Jumlah Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen
	4	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
	5	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang
	6	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang
	7	Jumlah laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan.	2 Laporan
	8	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota	2 Laporan

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 1, diarahkan melalui pelaksanaan 3 program dan 8 Sub Kegiatan:

Sasaran Strategis 2:

No	Indikator Kinerja	
	Uraian	Target
1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	100 Orang
2	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	100 Orang
3	Jumlah laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2 Dokumen

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 2, diarahkan melalui pelaksanaan 1 program dan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut;

PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	427,135,600	367,800,000	101,493,700	27.59
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	<i>427,135,600</i>	<i>367,800,000</i>	<i>101,493,700</i>	27.59
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	68,306,300	169,800,000	101,493,700	59.77
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	198,000,000	198,000,000	0	-
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2,917,423,000	3,076,726,500	159,303,500	5.18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2025 yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan tolak ukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dapat diukur dari beberapa unsur yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu Penetapan Kinerja (TAPKIN), rencana kerja tahunan (RKT), Pengukuran Kinerja (PK) Badan Kesbangpol Tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2025-2026. Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada outcome.

Tahun 2025, implementasi rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh yang tertuang dalam Rencana Strategis sebanyak 6 program dan 40 kegiatan dan yang tertampung dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025 sebanyak 5 program dengan 8 kegiatan serta 25 sub kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran kinerja (pada form PK) sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, maka pencapaian Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol tahun anggaran 2025 telah tercapai.

TABEL 3.1
TABEL REALISASI KINERJA
BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Program / Kegiatan	Indikator	Target	Kinerja Realisasi	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	30 Orang/Bulan	30 orang/bulan	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Dilaksanakan	7 Laporan	7 Laporan	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	100%
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				

Program / Kegiatan	Indikator	Target	Kinerja Realisasi	Capaian (%)
Pelaksanaan Kebijakan DI Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 orang	150 orang	100%
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	8 Orang	8 Orang	100%
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
<i>Perumusan Kebijakan Dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	100 Orang	100%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 laporan	1 Laporan	50%
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>				
Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100 Orang	100.0%

Program / Kegiatan	Indikator	Target	Kinerja Realisasi	Capaian (%)
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik				
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik</i>				
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10 Orang	10 Orang	100%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	0	0%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporandi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 laporan	2 Laporan	100%

Badan Kesbangpol perlu melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang berkesinambungan dengan Visi dan Misi Kota Banda Aceh guna terwujudnya Kota Banda Aceh yang maju dan kondusif dalam bingkai Syariah. Adanya indikator diperlukan sebagai tujuan atau hasil yang akan dicapai pada program maupun kegiatan yang telah disusun. Pada LKPJ Badan Kesbangpol Tahun 2025, akan dipaparkan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran yang telah disusun sebelumnya. Capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran yang dipaparkan pada LKJIP berdasarkan laporan fisik yang telah dihimpun setiap bulannya.

Berdasarkan tabel yang sudah dipaparkan di atas, maka dari 5 program yang direncanakan pada awal tahun anggaran maka yg dapat terakomodir pada DPPA Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh sebanyak

5 Program. Dalam hal capaian kinerja yang seharusnya dapat terealisasi 100 % sehingga akhir tahun anggaran SPD tidak dikeluarkan maka ada beberapa kegiatan yang tak dapat terealisasi.

TABEL 3.2
TABEL PERBANDINGAN PERSENTASI REALISASI KINERJA
TAHUN 2024 DENGAN TAHUN 2025

Program / Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2024		Program / Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2025	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100	%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100	%
<i>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi OPD yang Tersusun</i>	100	%	<i>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi OPD yang Tersusun</i>	100	%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan</i>	100	%	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan</i>	100	%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	12	Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	1	Tahun
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Administrasi Umum</i>	100	%	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Administrasi Umum</i>	100	%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Jenis	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Jenis	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang Dilaksanakan	20	Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang Dilaksanakan	10	Laporan

Program / Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2024		Program / Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2025	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	Unit
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Banunan Lainnya yang dipelihara/rehap lainnya	1	Unit	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Banunan Lainnya yang dipelihara/rehap lainnya	0	Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	%	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85	%
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85	%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi/Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi/Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	

Program / Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2024		Program / Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2025	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi/Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi/Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	30	%	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	0	%
<i>Perumusan Kebijakan Dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	<i>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	<i>30</i>	<i>%</i>	<i>Perumusan Kebijakan Dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	<i>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	<i>0</i>	<i>%</i>
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	Orang	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	Orang
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	Orang	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	Orang

Program / Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2024		Program / Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2025	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	Laporan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	Laporan
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	%	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tersedianya Data Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0	%
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</i>	<i>0</i>	<i>%</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</i>	<i>0</i>	<i>%</i>
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	0	Orang	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	0	Orang
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0	%	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0	%
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>Persentase Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>0</i>	<i>%</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>Persentase Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>0</i>	<i>%</i>
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	0

Program / Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2024		Program / Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2025	
Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	0	Orang	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	0	Orang
Pelaksanaan Monitoring di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	0	0	Pelaksanaan Monitoring di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	0	0
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100	%	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100	%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100	%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100	%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2	Dokumen	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2	Laporan
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2	laporan	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2	laporan

Pada tabel 3.2 di atas, dipaparkan perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2024 dengan Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terealisasi karena kegiatan-kegiatan tersebut mengalami Rasionalisasi anggaran sehingga ada anggaran yang tidak dapat dilaksanakan.

TABEL 3.3
TABEL PERBANDINGAN REALISASI KINERJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025
DENGAN REALISASI RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA	
		RENSTRA 2025	REALISASI 2025
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%	100%
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi OPD yang Tersusun	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	12 Bulan	30 orang/bulan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Administrasi Umum	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Dilaksanakan	20 Laporan	13 Laporan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA	
		RENSTRA 2025	REALISASI 2025
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	3 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	30 Unit
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85%	85%
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85%	85%
Pelaksanaan Kebijakan DI Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	4 Orang
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	90%	90%
Perumusan Kebijakan Dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	90%	90%
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemulihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	138.108 orang

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA	
		RENSTRA 2025	REALISASI 2025
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemolihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 laporan	2 Laporan
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	85%	85.0%
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>Persentase Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>85%</i>	<i>85.0%</i>
Pelaksanaan KoordinaSi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	5000 Orang
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100%	33%
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik</i>	<i>Pesentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>100%</i>	<i>33%</i>
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 laporan	2 Laporan
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 laporan	2 Laporan

Pada tabel 3.3 di atas, dipaparkan perbandingan realisasi kinerja pada Tahun 2025 dengan dokumen Renstra Tahun 2025. Beberapa kegiatan pada Tahun 2025 tidak mencapai target yang direncanakan

pada Renstra namun secara keseluruhan, kegiatan yang terdapat pada Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh tidak mencapai target yang ditetapkan di Tahun 2025.

3.2. ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN DAN PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DIRENCANAKAN

a. Permasalahan

Dalam memenuhi target capaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan masih menghadapi berbagai hambatan/kendala antara lain;

1. Masih rendahnya SDM pegawai yang dalam memahami tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang dimiliki
2. Keterbatasan sumber daya aparatur yang menguasai IT
3. Belum memadainya anggaran baik untuk pemeliharaan peralatan kantor maupun kegiatan lainnya, sehingga peralatan kantor yang rusak berat tidak bisa dilakukan perbaikan dan kegiatan-kegiatan lainnya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
4. Masih lemahnya pemahaman Lembaga/Institusi/SKPD lainnya terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol.
5. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD

b. Strategi Pemecahan Masalah

Dengan dijumpainya beberapa kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya, Badan Kesatuan Bangsa Kota Banda Aceh melakukan berbagai upaya untuk strategi pemecahan masalah tersebut sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan yang bermasalah tersebut akan kembali berjalan lancar. Adapun Strategi pemecahan masalah tersebut antara lain;

1. Adanya penambahan pegawai yang memiliki SDM yang handal dalam bidang IT.
2. Berharap kepada Walikota dan DPRK dapat mengalokasikan dana yang memadai untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak baik ringan maupun berat agar dapat terlaksananya program yang telah ditetapkan.
3. Adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna memenuhi capaian target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga /Institusi / SKPD lainnya agar lebih memahami terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Meningkatkan koordinasi antar SKPD

Hasil dari berbagai sasaran, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2025, belum secara tuntas dan menyeluruh mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas kinerja keuangan pada umumnya adalah merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dari anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sampai sejauh mana realisasinya dalam menunjang pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Anggaran yang telah digunakan untuk belanja pembangunan terdiri dari belanja langsung yang dipengaruhi oleh program dan berkinerja dan belanja tidak langsung yang tidak dipengaruhi oleh program yang dalam hal ini tidak berkinerja.

Pada Tahun 2025, pendanaan yang diterima oleh setiap program atau kegiatan yang terdapat dalam program-program pada Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh mengalami perubahan. Di bawah ini akan dipaparkan perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap programnya:

**TABEL KEGIATAN PROGRAM YANG MENGALAMI PERUBAHAN ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2025**

PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4
	8,731,354,627	12,134,533,109	3,403,178,482
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,885,402,727	4,421,512,284	-463,890,443
<i>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>21,455,500</i>	<i>20,795,000</i>	<i>-660,500</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,455,500	20,795,000	-660,500
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,317,498,327	3,795,207,284	-522,291,043
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,317,498,327	3,795,207,284	-522,291,043
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	79,529,900	116,147,000	36,617,100

PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	420,200	665,800	245,600
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,232,900	23,963,000	2,730,100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,876,800	11,518,200	3,641,400
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	80,000,000	30,000,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261,405,000	260,005,000	-1,400,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42,650,000	42,650,000	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	218,755,000	217,355,000	-1,400,000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205,514,000	229,358,000	23,844,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	200,220,000	220,220,000	20,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,294,000	9,138,000	3,844,000
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	427,135,600	342,257,800	-84,877,800
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	427,135,600	342,257,800	-84,877,800
Pelaksanaan Kebijakan DI Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	247,376,800	170,000,000	-77,376,800
Pembentukan Pasibraka	179,758,800	172,257,800	-7,501,000
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	584,243,000	3,444,526,500	2,860,283,500

PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4
Perumusan Kebijakan Dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	584,243,000	3,444,526,500	2,860,283,500
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilolihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	169,800,000	169,800,000	-
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilolihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	398,000,000	198,000,000	-200,000,000
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilolihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	16,443,000	3,076,726,500	3,060,283,500
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1,405,158,800	1,152,924,300	-252,234,500
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1,405,158,800	1,152,924,300	-252,234,500
Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	10,830,000	8,638,500	-2,191,500
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	1,394,328,800	1,144,285,800	-250,043,000
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik	1,429,414,500	2,773,312,225	1,343,897,725

PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1,429,414,500	2,773,312,225	1,343,897,725
Pelaksanaan Kebijakan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	15,208,000	14,746,500	-461,500
Pelaksanaan Koordinasi diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	13,797,000	12,897,000	-900,000
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1,025,572,000	2,266,831,225	1,241,259,225
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	374,837,500	478,837,500	104,000,000

Ada dua puluh tiga Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 pada dengan selisih anggaran sebesar Rp. 3.403.178.482,-

Selanjutnya akan dipaparkan kegiatan atau program dalam capaian realisasi anggaran.

TABEL REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		CAPAIAN
	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
1	2	3	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,421,512,284	4,426,441,622	100.11
<i>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	20,795,000	6,386,000	30.71
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,795,000	6,386,000	30.71
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3,795,207,284	3,893,725,665	102.60
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASn	3,795,207,284	3,893,725,665	102.60
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	116,147,000	64,854,840	55.84
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	665,800	-	0.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23,963,000	19,900,400	83.05
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,518,200	6,818,700	59.20
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80,000,000	38,135,740	47.67
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	260,005,000	238,393,917	91.69
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42,650,000	38,244,046	89.67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217,355,000	200,149,871	92.08
<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	229,358,000	223,081,200	97.26
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	220,220,000	214,089,200	97.22
pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,138,000	8,992,000	98.40

PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		CAPAIAN
	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
1	2	3	5
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	342,257,800	241,610,000	70.59
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	342,257,800	241,610,000	70.59
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	170,000,000	99,500,000	58.53
Pembentukan Paskibraka	172,257,800	142,110,000	82.50
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3,444,526,500	3,432,170,000	99.64
<i>Perumusan Kebijakan Dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	<i>3,444,526,500</i>	<i>3,432,170,000</i>	99.64
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilolihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	169,800,000	169,800,000	100.00
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilolihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	198,000,000	197,600,000	99.80
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilolihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3,076,726,500	3,064,770,000	99.61
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1,152,924,300	880,258,000	76.35

PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		CAPAIAN
	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
1	2	3	5
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1,152,924,300	880,258,000	76.35
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	8,638,500	-	.00
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	1,144,285,800	880,258,000	76.93
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik	2,773,312,225	1,753,900,000	63.24
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	2,773,312,225	1,753,900,000	63.24
Pelaksanaan Kebijakan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14,746,500	-	.00
Pelaksanaan Koordinasi diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12,897,000	-	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2,266,831,225	1,415,900,000	62.46
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	478,837,500	338,000,000	70.59
TOTAL	12,134,533,109	10,734,379,622	88.46

Dalam segi anggaran, pencapaian realisasi anggaran ke lima program yang dimiliki Badan Kesbangpol pada Tahun 2025 mencapai 88.46 %. Hal ini disebabkan karena sebahagian pekerjaan belum keluar SPD.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh stakeholders kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan laporan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan SKPD dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi yang tertuang dalam RPJM Kota Banda Aceh.

Pedoman penyusunan LKJIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dalam periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Tujuan penyusunan laporan ini untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Selain itu LKJIP Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2025 memuat laporan kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2025. Dalam pelaksanaan kinerja terdapat berbagai kendala yang dihadapi mengakibatkan pencapaian tidak optimal antara lain aparatur masih ada yang belum memahami tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang dimilikinya, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas, sehingga dapat dikatakan pencapaian sasaran dengan ukuran seperti angka – angka tersebut diatas cukup memberikan kebanggaan kepada kita yang pada hakekatnya merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak.

Dengan disusunnya LKJIP Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2025 ini, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan LKJIP ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan ditahun mendatang sangat kami harapkan.

Oleh karena itu penyempurnaan strategi dimasa yang akan datang perlu dilaksanakan terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan. Dengan menyempurnakan mekanisme perencanaan diharapkan penyusunan rencana kinerja tahunan melalui berbagai program dan kegiatan benar-benar dapat terlaksana, sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai semaksimal mungkin.

Akhirnya, semoga LKjIP ini menjadi pendorong dan pemicu bagi Badan Kesbangpol Banda Aceh dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

Banda Aceh, 14 Januari 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Banda Aceh



RIZAL ABDILLAH, S.Sos.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731218 199303 1 005